

**PENGARUH PENERAPAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP MANAJEMEN LABA  
(Studi pada BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009)**

**Annur Fitri Hayati & Gusnardi**

*Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau Kampus Baru Binawidya Pekanbaru*  
*Email: e-mail : gusnardi1967@yahoo.com & mgusnardi@yahoo.co.id*

**Abstract:** This study aims to determine and analyze the application of good corporate governance mechanism consisting of Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Commissioners and Audit Committee and partial simultaneous influence of Earnings Management on State Owned Company listed in Indonesia Stock Exchange. This study sample consisted of 14 companies from 2007 to 2009. The type of data used are secondary data is in the form of financial statements contained in the Indonesia Stock Exchange directory book Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Independent variables used this study is Managerial Ownership, Ownership Institutional, Independent Commissioners and Audit Committee. The statistical methods used to test the research hypothesis are a multiple linear regression. The results of this study indicate that (1) managerial ownership has no effect on earnings management; (2) institutional ownership affects earnings management, (3) the commissioner independent effect on earnings management, (4) the audit committee has no effect on earnings management, (5) simultaneously managerial ownership, institutional ownership, and the audit committee of independent commissioners' effect on earnings management.

**Keywords:** corporate governance, managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners, audit committee and earnings management

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2009. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan yang terdapat direktori Bursa Efek Indonesia dalam buku *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen dan Komite Audit. Adapun metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi *linear* berganda. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, (2) kepemilikan instiusional berpengaruh terhadap manajemen laba, (3) komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba, (4) komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, (5) secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan instiusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

**Kata Kunci:** good corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan instiusional, komisaris independen, komite audit dan manajemen laba

## PENDAHULUA

Salah satu informasi yang terdapat didalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Laporan laba merupakan produk informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas laporan tersebut tidak terlepas dari proses penyusunannya yang melibatkan pihak pengelola perusahaan seperti manajemen, komisaris, dan direksi. Kebijakan dan keputusan yang diambil mereka dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan menentukan kualitas dari laba perusahaan yang dilaporkan (Boediono, 2005).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2009).

Walaupun laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting direspon investor karena memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan, namun informasi laporan keuangan saja kadang tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investor karena ada kemungkinan informasi tersebut bias. Biasanya informasi laporan keuangan antara lain disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah manajemen laba (Murwaningsari, 2008).

Praktik manajemen laba dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yaitu sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif) dan tindakan yang salah (negatif). Manajemen laba dikatakan positif ataupun memberikan keuntungan bagi pemegang saham jika manajemen laba digunakan untuk memberikan sinyal tentang informasi privat yang dimiliki oleh manajer atau untuk mengurangi biaya politik, Watts dan Zimmermandalam Andreas (2009). Tetapi pemegang saham akan dirugikan jika manajemen laba digunakan untuk menghasilkan keuntungan abnormal pribadi bagi manajer seperti menaikkan kompensasi (Healy dalam Andreas, 2009) atau mengurangi kemungkinan pencatatan ketika kinerja manajer bersangkutan rendah (Weishbach dalam Andreas, 2009).

Manajemen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency cost*) yang dipicu dari adanya pemisah peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola (*agent*). Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Salno dan Baridwan dalam Restie, 2010). Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Sebagaimana diungkapkan oleh Veronica dan Utama (2005) *corporate governance* adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen. Ada empat mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan, yaitu meningkatkan kepemilikan

manajerial, meningkatkan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit (Andri dan Hanung, 2007).

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Arief dan Bambang, 2007). Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia yang melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi, adapun perusahaan-perusahaan yang tersangkut skandal tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Daftar perusahaan tersangkut skandal pelaporan akuntansi di Indonesia dari tahun 2001-2007

No	Nama Perusahaan	Tahun
1	PT. Lippo Bank Tbk	2002
2	PT. Kimia Farma (persero) Tbk	2002
3	PT. Indofarma (persero) Tbk	2004
4	PT. Andes Alfindo	2004
5	PT. Perusahaan Gas Negara persero Tbk	2007

**Sumber:** Dedhy dkk (2011)

Dengan melihat kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *goodcorporategovernance*. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan *goodcorporate governance*. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *good corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Boediono, 2005).

Di negara-negara Asia, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governanc* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga, di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF), dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang *corporategovernance*(Joni, 2006).

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan *Good Corporate Governance*. Wujud dari kepedulian pemerintah tersebut didirikan satu lembaga khusus yang bernama *Komite Nasional mengenai KebijakanCorporate Governance*(KNKCG), yang kemudian dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUI/06/2000. Selain dari itu terbentuk pula institut-institut yang berkecimpung di bidang *corporategovernance*, yaitu *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dan *Institute for Corporate Directorship* yang melakukan kegiatan pengkajian tentang implementasi prinsip *Good Corporate Governanc* dan penilaian penerapan *Good Corporate Governanc* di Indonesia sejak tahun 2001 berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI berisikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100 yang merupakan hasil survei mengenai penerapan *goodcorporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dilandasi dengan pemikiran

pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai implementasi *Good Corporate Governance* tahun 2009 pada perusahaan yang disurvei dapat diketahui 10 besar perusahaan dengan peringkat dapat dilihat pada tabel2.

**Tabel 2.** Peringkat *Corporate Governance Perception Index* 2009

No.	Perusahaan	Skor	Rating
1	PT Bank Mandiri Tbk	90,65	Sangat Terpercaya
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	88,67	Sangat Terpercaya
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk	88,37	Sangat Terpercaya
4	PT Aneka Tambang Tbk	85,87	Sangat Terpercaya
5	PT United Tractor Tbk	85,44	Sangat Terpercaya
6	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	82,27	Terpercaya
7	PT Elnusa Tbk	81,74	Terpercaya
8	PT Negara Indonesia Tbk	81,63	Terpercaya
9	PT Jasa Marga Tbk	81,62	Terpercaya
10	PT Asuransi Jasa Indonesia	81,59	Terpercaya

**Sumber :** [www.iicg.org](http://www.iicg.org) (2011)

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi manajemen laba dan ditemukan hasil yang beragam. Penelitian Darmawati (2003) serta Siregar dan Utama (2005) tidak menemukan bukti adanya hubungan signifikan antara pengelolaan laba dengan konsentrasi kepemilikan institusional. Hal ini diperkuat penelitian Cornet *et.al* (2006) yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ini disebabkan pandangan yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan pada laba jangka pendek sehingga keberadaannya tidak mampu mengurangi praktik manajemen laba. Hasil penelitian tersebut berkontradiksi dengan penelitian Nuryaman (2008) dimana semakin besar kepemilikan saham oleh pemegang saham maka semakin kecil praktik manajemen laba yang terjadi.

Penelitian Wedari (2004) dan Setiawan (2007) menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Penelitian mereka tersebut melaporkan bahwa proporsi dewan komisaris independen mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Berbeda dengan penelitian Siregar dan Utama (2005) dan Nuryaman (2008) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba.

Selain itu Nasution (2007) juga melakukan penelitian dengan menguji hubungan mekanisme *corporate governance* : komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap praktek manajemen laba. Penelitian dilakukan terhadap 60 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2000-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan.

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti perusahaan-perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 hingga tahun 2009. Dipilihnya perusahaan BUMN dikarenakan dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN yang mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah turut mendorong

pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik itu perusahaan Publik maupun BUMN. Khusus untuk perusahaan BUMN, upaya-upaya penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan dalam rangka program privatisasi BUMN (Ahmad Juanda, 2009) ini diharapkan dapat menjadi panutan bagi perusahaan-perusahaan publik lainnya dan memberikan kontribusi nilai yang maksimal dari segi finansial terhadap anggaran Negara dan nilai tambah yang kompetitif bagi perusahaan dan *stakeholders*-nya.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan maupun secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

***Good Corporate Governance.*** Latar belakang timbulnya *good corporate governance* adalah akibat dari berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang menimbulkan krisis ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi itu dan meredam kepanikan para investor yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama *Sarbanes-Oxley Act 2002*. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan *good corporate governance* baik di Amerika maupun di Indonesia.

Sukrisno Agoes (2009) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

*Organizations for Economic Cooperation and Development-OECD* menyatakan bahwa *Good corporate governance* sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja (Tjager dkk dalam Sukrisno Agoes, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik guna mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencegah timbulnya kecurangan atau kesalahan dari pihak manajemen yang dapat merugikan komisaris, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Konsep *good corporate governance* merupakan upaya perbaikan terhadap sistem dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Namun harus disadari bahwa betapa pun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para pelaku bisnis itu sendiri.

**Teori Agensi (*Agency Theory*).** Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*,

sehingga memicu biaya keagenan (Jensen dan Meckling dalam Andreas, 2009). Agar hubungan ini berjalan lancar, *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agent* dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Dalam menyelesaikan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *agent* dan *principal* dapat terjadi konflik kepentingan yang disebut agensi konflik, yang merupakan inti dari teori keagenan (Scott dalam Riadi, 2011).

Agensi konflik ini muncul disebabkan pihak-pihak yang terkait (*stockholder*, manajer dan *bondholder*) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. *Principal* akan menugaskan agen untuk meningkatkan kemakmuran manajer sebagai agen juga mempunyai dorongan untuk meningkatkan kemakmurannya, namun sebaliknya manajer sebagai agen juga mempunyai dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri antara lain dengan melakukan manajemen laba.

Penyebab timbulnya manajemen laba akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang terhendaki (Ali, 2002).

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori agensi, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau meninvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang ditanamkan oleh investor.

**Manajemen Laba.** Manajemen laba merupakan pola atau cara yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan atau laba perusahaan. Schipper dan Vincent dalam Ristie (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Menurut Halim (2005) mengartikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Acceted Accounting Principles* (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dengan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setawati dan Na'im, 2000). Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan. Dalam hal ini, investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan resiko portopolio (Halim, 2005).

**Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba.** Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial diasumsikan dapat mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Utama dan Afriani (2005) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak terlepas dari struktur kepemilikan

perusahaan. Boediono (2005) menyebutkan secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Midyastuti dan Machfoed (2003) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah ketidakselarasan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Siallagan dan Mahfoez (2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis, ketika manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku opportunistik manajer akan meningkat.

**Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba.** Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitori perusahaan, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan karena kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk mengawasi manajemen.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Bushee dalam Boediono (2005) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan tindakan manajemen laba.

**Komisaris Independen dan Manajemen Laba.** Istilah dan keberadaan Komisaris Independen baru muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 Tanggal 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen ini rupanya berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu Jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. FCGI (2001) menyatakan bahwa salah satu pihak yang merupakan bagian terpenting dari terlaksananya konsep GCG adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen, karena dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan tindakan manajemen laba.

Melalui peranannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat dipengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laba dapat diminimalisir (Wedari, 2004). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Ujiyanto dan Pramuka (2007) yang menemukan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

**Komite Audit dan Manajemen Laba.** Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-103/MBU/2002 mengenai pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat membentuk Komite Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat

mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi Komite Audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Suayana (2005) dan Siallagan & Mas'ud (2006) menunjukkan adanya perbedaan koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Carcello *et al.* dalam Restie (2010) telah menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

**Hubungan *Good Corporate Governance* dan BUMN.** Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa pelaku utama dalam sistem perekonomian Indonesia adalah: Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan Koperasi. BUMN sebagai salah satu pelaku utama perekonomian nasional bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang keberadaannya pada saat ini diatur dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

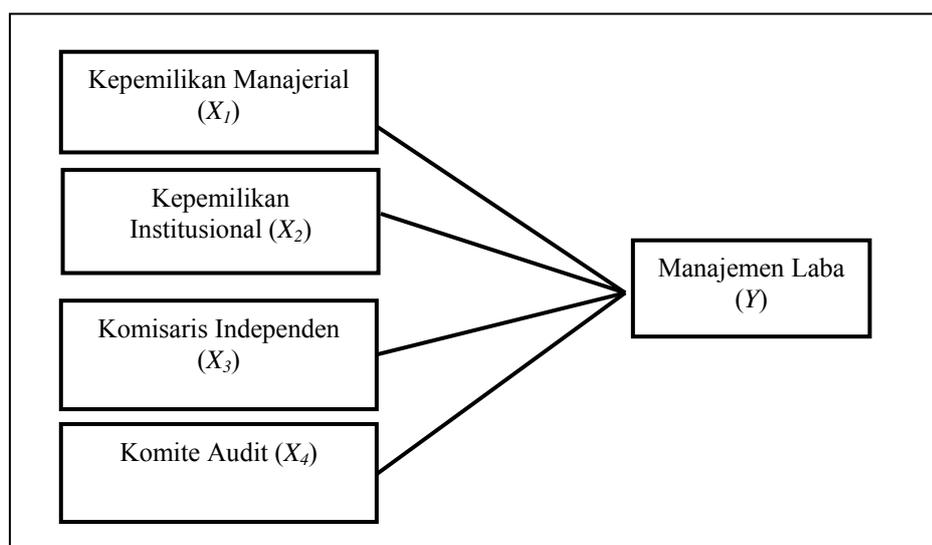
Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (Tjager dkk dalam Sukrisno Agoes, 2009). Ada lima prinsip menurut keputusan ini. Selanjutnya, *National Committee on Governance* mempublikasikan "Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesian's Code of Good Corporate Governance*)" pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang *Good Corporate Governance* ini bukan merupakan suatu peraturan tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas.

**Hipotesis Penelitian.** Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka dapat di hipotesiskan penelitian ini sebagai berikut:

Ho : penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ha : penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dari kajian teoritis dan hipotesis yang diajukan, dapat digambarkan kerangka penelitian seperti dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Kerangka Model Penelitian

## METODE

**Populasi dan Sampel.** Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN dari tahun 2007 hingga 2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 14 perusahaan. Sedikitnya jumlah perusahaan yang akan diteliti maka penulis memakai seluruh populasinya sebagai sampel.

**Operasionalisasi Variabel Penelitian.** Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut dalam Tabel 3 penjelasan masing-masing variabel diatas.

**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
1	Good Corporate Governance	1. Kepemilikan Manajerial	Jumlah saham manajer dibagi jumlah saham beredar	Rasio
		2. Kepemilikan Institusional	Jumlah saham institusi dibagi jumlah saham beredar	Rasio
		3. Komisaris Independen	Jumlah komisaris dibagi jumlah seluruh komisaris	
		4. Komite Audit	Komite audit minimal berjumlah tiga orang diberi nilai 1, dan yang belum memenuhi criteria diberi nilai 0	Rasio
2	Manajemen Laba	<i>discretionary accrual (DA)</i>	(Total akrual perusahaan pada periode ke t dibagi Total asset perusahaan pada periode ke t-1) Dikurang <i>Non Discretionary Accruals (NDA)</i> perusahaan pada periode ke t	Dummy Rasio

**Analisis Data.** Analisis data yang digunakan dalam peneliti ini digunakan metode statistik regresi *linear* berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hipotesis yang diajukan di atas, maka model yang digunakan untuk melihat pengaruh penerapan mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$DA = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 INST + \beta_3 KI + \beta_4 AUD + e$$

keterangan: *\_ML* = Manajemen Laba; *\_α* = Konstanta; *\_β* = Koefisien Regresi; *KM* = Kepemilikan Manajerial; *\_INST* = Kepemilikan Institusional; *\_KI* = Komisaris Independen; *AUD* = Komite Audit; *\_e* = Standar Error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Statistik Deskriptif.** Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen. Statistik deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi dalam bentuk gambar, ukuran dan dalam bentuk yang lain agar pihak lain dapat dengan mudah memahami karakteristik data observasi tersebut. Pengukuran statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 17.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan terhadap 14 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Hasil perhitungan statistik deskriptifnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Tabel 4.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	42	.00080	.89555	.2217756	.18881029
KM	42	.00000	1.26271	.1107467	.24456096
INST	42	51.00038	90.02521	65.2374266	11.41965496
KI	42	.00000	71.42857	42.3299320	16.28138851
AUDIT	42	.00000	1.00000	.6428571	.48496560
Valid N (listwise)	42				

**Sumber:** Pengolahan SPSS 17 Penelitian 2011

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui statistik dari masing-masing variabel, yakni:

1. Hasil deskriptif dari Manajemen Laba (ML) adalah antara 0,0080 sampai dengan 0,89555 dengan rata-rata sebesar 0,2217756 dan standar deviasi 0,18880129. Berarti rata-rata tindakan manajemen laba pada perusahaan BUMN sebesar 0,2217756.
2. Kepemilikan Manajerial (KM) antara 0,00000 sampai dengan 1,26271 dengan rata-rata 0,1107467 dan standar deviasi 0,24456096. Dengan rata-rata 0,1107467% yang berarti bahwa rata-rata saham yang dimiliki manajerial sangat kecil yaitu hanya 0,1107467% dari seluruh saham yang beredar. Sedangkan standar deviasinya sebesar 0,24456096 %, hal ini menunjukkan ukuran penyebaran data sebesar 0,24456096%.
3. Kepemilikan institusional (INST) dengan rata-rata 65,2374266 yang berarti bahwa rata-rata saham yang dimiliki pemerintah dan investor institusi lainnya dalam suatu

perusahaan sebesar 65,2374266% dari seluruh saham yang beredar. Sedangkan standar deviasinya sebesar 11,41965496, hal ini menunjukkan ukuran penyebaran datanya sebesar 11,41965496%.

4. Komisaris independen (KI) dengan rata-rata sebesar 42,32999320 yang artinya jumlah komisaris independen yang berada pada dewan komisaris rata-rata sebesar 42,32999320%. Sedangkan ukuran penyebaran datanya sebesar 16,28138851.
5. Untuk komite audit (AUDIT) menunjukkan nilai rata-rata 0,6428571 yang artinya bahwa jumlah komite audit dalam suatu perusahaan rata-rata 0,6428571% dengan ukuran penyebaran datanta sebesar 0,48496560.

**Uji Asumsi Klasik.** Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi.** Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan program *SPSS versi 17.0*. Analisis ini dilakukan dengan metode enter. Semua variabel independen digunakan sebagai prediktor atas variabel dependen. Berikut ini model regresi yang digunakan:

$$ML = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 INST + \beta_3 KI + \beta_4 AUDIT + e$$

**Tabel 5.** Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94996791
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.838
Asymp. Sig. (2-tailed)		.484

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Sumber:** *Pengolahan SPSS Penelitian 2011*

Berdasarkan Tabel 5 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah :  $ML = 0,895 - 0,068KM - 0,006INST - 0,007KI + 0,088AUDIT$ , maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Besarnya koefisien konstanta adalah 0,0895 dengan nilai positif, yang berarti jika semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh, maka besarnya Manajemen Laba 0,0895.
2. Koefisien regresi untuk variable Kepemilikan Manajerial (KM) adalah sebesar -0,068 menunjukkan bahwa jika KM mengalami kenaikan 1%, maka Manajemen Laba akan mengalami penurunan sebesar 0,068 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara KM dengan Manajemen Laba, semakin naik KM maka semakin turun Manajemen Laba.

3. Koefisien regresi untuk variable variabel Kepemilikan Institusional (INST) adalah sebesar  $-0,006$  menunjukkan bahwa jika INST mengalami kenaikan 1%, maka Manajemen Laba akan mengalami penurunan sebesar  $0,006$  dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara INST dengan Manajemen Laba, semakin naik INST maka semakin turun Manajemen Laba.
4. Demikian juga halnya dengan variabel Komisaris Independen (KI) adalah sebesar  $-0,007$  menunjukkan bahwa jika KI mengalami kenaikan 1%, maka Manajemen Laba akan mengalami penurunan sebesar  $0,007$  dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara KI dengan Manajemen Laba, semakin naik KI maka semakin turun Manajemen Laba.
5. Pada variabel Komite Audit (AUDIT) koefisiennya adalah sebesar  $0,088$  artinya jika AUDIT mengalami kenaikan 1% maka Manajemen Laba akan mengalami peningkatan sebesar  $0,088$  dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara AUDIT dengan Manajemen Laba, semakin naik AUDIT semakin bertambah Manajemen Laba.

**Pengujian Hipotesis.** Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk pengujian secara simultan yaitu seluruh variabel independen (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap variabel dependen (Manajemen Laba).

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $5,617$  dengan signifikan  $0,001$  dan  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada  $\alpha 0,05$  dengan  $df1$  (jumlah variabel-1) atau  $5-1=4$  dan  $df2$  ( $n-k$ ) atau  $42-5=37$  maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar  $2,626$ . Oleh karena itu dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $5,617 > 2,626$ ) maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil ini sejalan dengan penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kusumaning (2004), Boediono (2005) serta Ujiantho dan Pramuka (2007). Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.895	.174		5.139	.000		
KM	-.068	.102	-.089	-.670	.507	.962	1.039
INST	-.006	.002	-.387	-2.657	.012	.794	1.259
KI	-.007	.002	-.622	-4.271	.000	.792	1.262
AUDIT	.088	.062	.226	1.425	.162	.671	1.491

a. Dependent Variable: DA

**Sumber:** Pengolahan SPSS 17 Penelitian 2011

Penentuan hipotesis secara parsial yaitu dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$

diterima, yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini menunjukkan variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada  $\alpha = 0,05$  dengan  $df_1 (n-k)$  atau  $42-5 = 37$  maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,687.

**Tabel 7.** Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.615 <sup>a</sup>	.378	.311	.1567739	.378	5.617	4	37	.001	1.967

a. Predictors: (Constant), AUDIT, KM, INST, KI

b. Dependent Variable: DA

**Sumber:** Pengolahan SPSS 17 Penelitian 2011

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  Kepemilikan Manajerial (KM) yaitu sebesar -0,670 dengan signifikan 0,507. Hasil ini menunjukkan bahwa  $-t_{hitung} = -0,670 > -t_{tabel} = -1,687$  maka  $H_a$  ditolak  $H_0$  diterima dan yang berarti variabel Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Disini tidak ada perbedaan antara manajerial perusahaan yang memiliki saham atau tidak dalam pencapaian tingkat laba. Hal ini disebabkan masih minimnya kepemilikan saham oleh manajer di perusahaan, karena tingginya kepemilikan saham oleh manajerial dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan laba mempunyai kekuatan responsif yang dapat memberikan reaksi positif bagi pihak-pihak yang perkepentingan seperti pemegang saham dan pelaku pasar modal pada umumnya (Boediono, 2005).

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yaitu sebesar  $-2.657 < -t_{tabel}$  sebesar -1,687 dengan signifikansi 0,012. Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti variabel Kepemilikan Instiusional (INST) berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang menemukan adanya pengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti kenaikan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mengurangi manajemen laba. Hasil ini konsisten dengan konsep yang ada, menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba Bushee dalam Boediono (2005) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa  $-t_{hitung}$  yaitu sebesar  $-4,271 < -t_{tabel}$  sebesar -1,687 dengan signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti variabel Komisaris Independen (KI) mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Laba. Hal ini dikarenakan melalui peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun

laporan keuangan sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laba dapat diminimalisir (Boediono, 2005). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wedari (2004) Ujiyanto dan Pramuka (2007) yang menemukan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yaitu sebesar  $1,425 < t_{tabel}$  sebesar 1,687 dengan signifikansi 0,162. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Komite Audit (AUDIT) tidak mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Veronica dan Utama (2005) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit belum mampu menjadi salah satu faktor yang mengurangi tindakan manajemen laba di dalam perusahaan. Hal ini karena masih ada perusahaan yang belum membentuk komite audit yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1003/MBU/2002. Dan hal ini dapat dijelaskan bahwa komite audit oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak dimaksud untuk menegakkan *Good Corporate Governance* didalam perusahaan (Veronica dan Utama, 2005).

## PENUTUP

**Kesimpulan.** Hasil pengujian secara simultan yakni seluruh variabel independen (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap variabel dependen (Manajemen Laba) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen karena menghasilkan  $F_{hitung}$  sebesar 5,617 dan  $F_{tabel}$  2,662. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dapat diartikan bahwa Mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan Manajemen Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dari hasil pengujian regresi linear berganda secara parsial dapat disimpulkan bahwa: (1) Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan masih minimnya kepemilikan saham oleh manajer di perusahaan. (2) Pada hasil pengujian hipotesis Kepemilikan Institusional (INST), terlihat bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena Kepemilikan Institusional sudah mampu mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Bushee dalam Boediono, 2005). (3) Pada hasil pengujian hipotesis variabel Komisaris Independen (KI), dapat diketahui bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan peran komisaris independen sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laba dapat diminimalisir (Boediono, 2005). (4) Hasil pengujian hipotesis variabel Komite Audit (AUDIT) yang menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena masih ada perusahaan yang belum membentuk komite audit yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1003/MBU/2002 dan komite audit yang ada di perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja,

tetapi tidak dimaksud untuk menegakkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan (Veronica dan Utama, 2005)

**Saran.** Berdasarkan hasil penelirian, pembahasan serta kesimpulan dapat disaran beberapa hal sebagai berikut: **Pertama.** Bagi perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan penerapan Mekanisme *Good Corporate Governance* karena penerapan yang secara tepat dapat dijadikan sebagai sistem kontrol perusahaan terhadap tindakan-tindakan kecurangan manajemen. **Kedua.** Penelitian ini belum mengungkapkan mekanisme *Good Corporate Governance* lain untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen laba seperti kualitas auditor, audit internal, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi dan lain sebagainya. **Ketiga.** Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga dalam mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance*. **Keempat.** Bagi penelitian selanjutnya perlu memperpanjang periode tahun pengamatan dengan periode atau rentang waktu yang berbeda dan mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam menentukan *discretionary accrual* sehingga dapat melihat adanya manajemen laba dengan sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Juanda. (2009). Analisis Konseptual Good Corporate Governance. Naskah Publikasi Penelitian Dasar Keilmuan.
- Ali Irfan. (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi* Vol.XIX (2) Juli 2002.
- Andreas. (2009). Tata Kelola Korporasi Dan Masalah Keagenan Di Indonesia. Malang: Agritek YPN Malang.
- Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko., (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *SNA X*. Makassar.
- Boediono SB, Gideon. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur Pasar. *SNA VIII*. Solo.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. <http://papers.ssrn.com/>.
- Darmawati, D. (2003). Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 5, (1).
- Dedhy Sulistiawan dkk. (2011). Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Malang: Salemba Empat.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid II. Edisi ke-2. Jakarta.
- Halim, Julia, dkk. (2005). Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk Dalam Indeks LQ-45. *SNA VIII*. Solo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Joni Emirzon. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.4 (8).

- Kharisma Yuanita. (2006). Pengaruh Praktek Manajemen Laba Terhadap Modal Biaya (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Marihot Nasution dan Doddy Setiawan. (2007). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *SNA X*. Makasar.
- Midiastuty, Pratana P. Mas'ud Machfoedz. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. *SNA VI*. Solo.
- Murwaningsari, Ety. (2008). Pengujian Simultan: Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earning Response Coefisien (ERC). *SNA XI*. Pontianak.
- Nasution, M., dan Doddy Setiawan. (2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. *SNA X*. Makasar.
- Nuryaman. (2007). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. *SNA XI*. Pontianak
- Restie Ningsaptiti. (2010). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- R.M Riadi. (2011). Pengaruh Human dan Non Human Faktor Terhadap Kinerja Perusahaan. Naskah Publikasi Usulan Penelitian Pola Ilmiah Pokok.
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im. (2000). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.15 (4).
- Siallagan, Hamonangan dan Mas'ud Machfoeds. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *SNA IX*. Padang.
- Siregar, SVN dan Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *SNA VIII*. Solo.
- Suaryana, Agung, (2005). Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba. *SNA VIII*. Solo.
- Sukrisno Agoes. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syamsuardi. (2008). Pengaruh Praktek Corporate Governance Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2009). *Good Corporate Governance dalam Perspektif Manajemen Strategik*
- Ujiyantho, Muh. Arief. Bambang Agus Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur). *SNA X*. Makassar.
- Veronica,S dan Utama, S., (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *SNA VIII*. Solo.
- Wedari, Linda Kusumaning. (2004). Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *SNA VI*. Denpasar.